



HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERTANAHAN TAHUN 2016

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
ADVOKASI DAN DOKUMENTASI HUKUM
TAHUN 2017**

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERTANAHAN TAHUN 2016



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
ADVOKASI DAN DOKUMENTASI HUKUM
TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

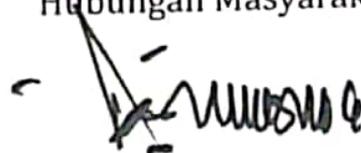
Salah satu fungsi Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat adalah melaksanakan Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum. Dalam rangka peningkatan dan pendayagunaan pelayanan informasi hukum secara tepat, tertib, dan berkesinambungan, Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum menerbitkan Buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan Tahun 2016.

Buku ini sebagai sarana informasi, publikasi sekaligus pendokumentasian hukum pertanahan, berisi Peraturan-peraturan terkait dengan pertanahan tahun 2016, yang berisi Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Surat Edaran. Demikian, harapan kami semoga penerbitan buku ini bermanfaat dan memenuhi harapan bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Jakarta,

2017

Kepala Biro Hukum dan
Hubungan Masyarakat,



Dr. Aslan Noor, S.H., M.H., Sp1.
NIP. 19590412 198303 1 010

DAFTAR ISI

I	Kata Pengantar	ii
II	Daftar Isi	iii
A.	Undang-Undang	
1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016	Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam 1
B.	Peraturan Pemerintah	
1.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016	Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman 58
2.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016	Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya 162

- | | | | | |
|----|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3. | Peraturan
Republik
Nomor 40 Tahun 2016 | Pemerintah
Indonesia | Pajak Penghasilan Atas
Penghasilan Dari
Pengalihan Real Estat
Dalam Skema Kontrak
Investasi Kolektif
Tertentu | 182 |
| 4. | Peraturan
Republik
Nomor 55 Tahun 2016 | Pemerintah
Indonesia | Ketentuan Umum Dan
Tata Cara Pemungutan
Pajak Daerah | 190 |
| 5. | Peraturan
Republik
Nomor 57 Tahun 2016 | Pemerintah
Indonesia | Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2014
Tentang Perlindungan
Dan Pengelolaan
Ekosistem Gambut | 229 |

C. Peraturan Presiden

- | | | | | |
|----|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. | Peraturan
Republik
Nomor 9 Tahun 2016 | Presiden
Indonesia | Percepatan
Pelaksanaan
Kebijakan Satu Peta
Pada Tingkat
Ketelitian Peta Skala
1: 50.000 | 249 |
|----|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

D. Peraturan Menteri

1. Peraturan Menteri Perubahaan Nama 258
Agraria Dan Tata Ruang/ Kantor Pertanian
Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Pontianak
Nasional Nomor 1 Tahun Menjadi Kantor
2016 Pertanian Kabupaten
Mempawah Provinsi
Kalimantan Barat

2. Peraturan Menteri Perubahaan Atas 262
Agraria Dan Tata Ruang/ Peraturan Menteri
Kepala Badan Pertanahan Agraria Dan Tata
Nasional Nomor 2 Tahun Ruang/ Kepala Badan
2016 Pertanian Nasional
Nomor 21 Tahun
2015 Tentang
Pendayagunaan
Tanah Negara Untuk
Pedagang Kaki Lima

3. Peraturan Menteri Pembentukan 270
Agraria Dan Tata Ruang/ Organisasi, Wilayah
Kepala Badan Pertanahan Kerja, Tugas Dan
Nasional Nomor 3 Tahun Fungsi
2016 Perwakilan Kantor
Pertanahan
Kabupaten Muna
Barat
Provinsi Sulawesi

Tenggara

- | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4. | Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 | Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas Dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah | 278 |
| 5. | Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 | Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas Dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan | 286 |
| 6. | Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2016 | Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas Dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai | 294 |

